



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA**

Jalan Pengeran Muhamad Km 05 Simpeureum -
Cigasong Telp. (0233)



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian integral dari program Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka serta merupakan revisi / perubahan, sehubungan dengan dibentuknya kelembagaan baru, serta pengaruh terjadinya bencana Pandemi Virus Corona Disease Covid-19 dengan disusunnya RENJA ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah Kebijakan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan Persandian satu tahun ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkret. apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan revisi/ perubahan muatan RENSTRA maupun RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya, revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran.

RENJA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaksanakan secara transparansi dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*Better Performance*)

Semoga RENJA ini bermanfaat bagi kita semua.

Majalengka , September 2020

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1760528 199412 1 001



DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-7
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	I-12
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-13
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-23
2.5. Tenelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	2-24
BAB. III. TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN.....	3-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	3-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	3-2
3.3. Program dan Kegiatan.....	3-7



BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....'	4-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021	4-1
BAB. V. PENUTUP.....	5-1
5.1. Penutup.....	5-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1	Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
2	Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
3	Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
4	Tabel T-C 32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemegang Kepentingan Tahun 2021
5	Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
6	Tabel 6 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021



**DAFTAR TABEL
RENJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No		Hal
1	Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Tahun Berjalan)	2-2
2	Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	2-8
3	Tabel TC-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	2-24
4	Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	2-25
5	Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan Maju tahun 2022 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Majalengka	3-10
6	Tabel 6 Rencana Kerja Program Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	4-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Konsekuensi perubahan peraturan tersebut diatas, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah teknokratik (Renstra PD) Tahun 2018 – 2023 dan di disesuaikan dengan perubahan diatas, khususnya Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan adanya Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2019 – 2023 pelaksanaan untuk tahun 2021 sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serta arah kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Majalengka, Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam penyusunan Renja ini terutama dalam peletakan pondasi dasar pembangunan teknologi komunikasi, informatika Statistik Sektoral dan Persandian di Kabupaten Majalengka dalam menghadapi isu-isu strategis pembangunan di tingkat Kabupaten. Isu-isu dimaksud di antaranya telah terbangunan Bandara Internasional Jawa Barat, Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten Majalengka, Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata Majalengka, Pengembangan Produksi dan Kawasan Agropolitan, perwujudan Desa Mandiri (Desa tangguh) dan tata kelola Pemerintahan yang baik. Isu-isu tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi perwujudan pembangunan terhadap isu-isu strategis di atas.

Disamping itu, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021 Misi bidang Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian yang tertuang dalam Misi 3 (Tiga) yaitu: **Membangun Sinergi dan Hubungan yang Harmonis dengan Seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan baik dengan Unsur Legislatif, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta para Pemangku Kepentingan Lainnya.**

“ Tujuan dan Sasaran yang di upayakan dalam meningkatkan “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** “ hal ini juga tercermin dalam 9 Prioritas Pembangunan Unggulan Pembangunan Majalengka diantaranya:

1. Pengentasan Kemiskinan dengan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang jelas
1. Penyediaan Buku Pelajaran Bagi SD, SMP, secara Gratis
2. Pelayanan Kesehatan Gratis berkala dan tuntas
3. Pemberian Insentif Guru ngaji, Imam Masjid dan Bantuan Sarana Keagamaan
4. Pembangunan Jembatan di Daerah Pasir Ayu Kecamatan Sindang
5. Pelayanan KTP gratis secara mobile
6. Pelayanan perijinan secara mudah, cepat dan transparan
7. Evaluasi pajak bumi dan bangunan
8. Peningkatan Tunjangan Kinerja ASN

Sedangkan Perumusan misi yang tepat merupakan faktor penentu dari tercapainya visi yang akan dicapai dalam suatu periode Pemerintahan. Misi yang baik adalah misi yang mampu menjabarkan langkah-langkah untuk mencapai visi secara jelas, ringkas dan mudah dipahami, dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

➤ **Misi Pertama:**

Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;

➤ **Misi Kedua:**

Meneguhkan nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;

➤ **Misi Ketiga:**

Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;

➤ **Misi Keempat:**

Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

➤ **Misi Kelima:**

Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Visi dan Misi Kabupaten Majalengka, maka program dan kegiatan daerah harus bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen rencana tahunan OPD untuk periode masa 1 (satu) tahun anggaran, Rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program-program pembangunan tahunan daerah yang menghubungkan inisiatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika yang bervisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola Manajemen Pemerintahan untuk **memanfaatkan** TIK diberi mandat

dalam menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan **akuntabilitas** dalam upaya penyelenggaraan layanan- layanan pemerintah dalam penyebaran luasan Informasi kepada publik (Publik Service) *e- Government*.

Di dalam Organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri, oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efektif,efesien, serta dibutuhkan partisipasi dan kerja sama elemen-elemen birokrasi, stakeholder, dunia usaha dan akademisi sampai ke lapisan masyarakat umum, hal ini **menjadi** peran Dinas komunikasi dan Informatika.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, telah **ter gambarkan** tentang keseriusan upaya pemerintahan dalam **menerapkan** pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan dan sampai **ke tata** kelolaan Komunikasi dan informatika sampai lapisan bawah dalam hal adalah Masyarakat umum.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah kebijakan Organisasi. Dukungan teknologi informasi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan Organisasi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unsur Dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika demi terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good government*).

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan **Provinsi** Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor : 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan **Pembangunan** Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RO Nomor 4252);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara **Republik** Indonesia Nomor 4693);

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
16. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan **Evaluasi** Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 ,Tambahan **Lembaran** Negara Nomor 4815);
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman **Pengelolaan** Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten **Majalengka** Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 tanggal 18 Juni 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, **Kodifikasi** dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
5. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
6. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
7. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan PD antar tingkat pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, **Landasan** Hukum.

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SEBELUMNYA

Menguraikan tentang Evaluasi Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB.III. TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

Mengemukakan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi **tentang** arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran OPD merumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsi, serta Program dan Kegiatan.

BAB. IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.



BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menurut DPPA Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.042.117.975,00. Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 4 program dan 33 kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2020 yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp.55.140.332.000,00 yang terdiri dari 5 Program dan 37 kegiatan. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 terdapat keunikan karena adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2020, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2019 berdasarkan Renstra Teknokratik Periode tahun 2019-2023 sedangkan untuk dokumen perencanaan tahun 2020 telah mengacu pada dokumen perencanaan

strategis periode 2019-2023 yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga indikator kinerja. Dan juga untuk perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dokumen perencanaan tahun 2021 yang mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 sehingga core business Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perencana mengalami beberapa perubahan meskipun terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 masih dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel **1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2019 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Apabila dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA pada tahun 2019 terdapat 4 program dan 33 Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2019 terealisasi pada masing-masing kegiatan sebanyak 100 % sebagaimana terlampir di bawah ini :seperti terlihat **pada tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)** dibawah (terlampir).

(1) Program Peningkatan Sumber daya Aparatur

Program dan Kegiatan ini dengan Sasaran Program meningkatkan Kapabilitas Aparatur Melalui Kegiatan :

1. Updating Portal Data dan PGD
2. Kajian Data Statistik Sektoral
3. Survey Data Statistik Sektoral

Target Kinerja Program adalah 11 Dokumen dengan Capaian Kinerja Program 10 Dokumen dengan rata-rata capaian Kinerja (Predikat Kinerja) 100 % dan realisasi anggaran Renja rata-rata 97,49

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik

Program dan Kegiatan ini dengan Sasaran Program Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Melalui Kegiatan :

1. Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi
2. Pengembangan Server Pusat Informasi
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo
6. Penyusunan dan Perencanaan Regulasi TIK

Target Kinerja Program adalah 26 Unit dengan Capaian Kinerja Program 26 Unit dengan rata-rata capaian Kinerja (Predikat Kinerja) 89,00 % dengan realisasi anggaran Renja sebesar 90,89 %

(3) Program Administrasi Perkantoran

Program dan Kegiatan ini dengan Sasaran Program Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Melalui Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Penyusunan DPA OPD
7. Penyusunan RKA OPD
8. Penyusunan Renja OPD
9. Penyusunan LAKIP OPD
10. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
12. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis

Bulan Berikutnya.

Target Kinerja Program adalah 59 Dokumen dengan Capaian Kinerja Program 59 Dokumen dengan rata-rata capaian Kinerja (Predikat Kinerja) 99,27 % % dengan realisasi anggaran Renja sebesar 93.52 %

(4) Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan ini dengan Sasaran Program Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Melalui Kegiatan :

1. Pembangunan E Government
2. Desiminasi Informasi Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Rakyat dan Wawar keliling
3. Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
4. Pelayanan Informasi Publik
5. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi Ke Luar Daerah
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
11. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Pengembangan dan Kemitraan Media

Target Kinerja Program adalah 186 Jenis dengan Capaian Kinerja Program 186 Jenis dengan rata-rata capaian Kinerja (Predikat Kinerja) 98,87 % % dengan realisasi anggaran Renja sebesar 93.81 %

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengacu pada analisis kinerja pelayanan di bidang Komunikasi informasi Statistik Sektoral Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perubahan urusan Ketahanan Pangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dari Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM. SPM Bidang Komunikasi Informasi Statistik berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian
- Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan asli Daerah berupa retribusi jasa umum pengendalian Menara Telekomunikasi
- Mengatur, mengendalikan, pengawasan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian
- Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dijabarkan dengan peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, tugas pokok Dinas adalah : **Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan bidang Statistik sektoral dan Persandian** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang di bentuk berdasarkan Perda 14 Tahun 2016 adalah merumuskan, menyelenggarakan kegiatan, membina, mengevaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
2. Penyelenggaraan Kegiatan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan umum urusan Komunikasi, Informatika Statistik sektoral dan Persandian
3. Penyelenggaraan Pembinaan dan bimbingan teknis urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian
4. Evaluasi dan Pelaporan urusan umum Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian
5. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majalengka adalah :

- Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian;
- Menyelenggarakan Retribusi jasa umum pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- Mengatur, mengendalikan, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian
- Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat , Provinsi maupun Kabupaten / Kota

4. Susunan Perangkat Daerah

Tata laksana Susunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Majalengka unsur-unsur nya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- a. Sekertaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan PEP
- b. Bidang Komunikasi membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan dan Pengaduaan Informasi Publik
 - b) Seksi Pengelolaan dan Desiminasi Informasi
 - c) Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik
- c. Bidang Informatika Membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
 - b) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika
 - c) Seksi tata kelola E-Government Informatika
- d. Bidang Statistik Sektora l membawahkan:
 - a) Seksi Pengelolaan dan Analisis Data
 - b) Seksi Persandian bidang Statistik Sektoral
 - c) Seksi Kompilasi Data Statistik Sektoral

(Struktur Organisasi sebagaimana Daftar terlampir)

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Publik serta Keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Tabel 2 (Tabel.T-C.30) berikut ini :**

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, ada 2 tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas

Komunikasi dan Informasi, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan Dasar 1 (Satu) dibidang Komunikasi dan informatika dan 2 (dua) urusan di bidang Statistik Sektoral dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab /Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK **Smart City**;
10. Penyelenggaraan **Government Chief Informasi Officer (GCIO)**;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi bidang urusan Statistik dan Persandian adalah :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral.
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.
5. Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral dan Persandian;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah diinisiasi dan

diupayakan dalam Kemitra-kerjaan dalam Pelaksana Program Kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian serta koordinasi dan kerjasama pemerintah Pusat dan Provinsi masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain : berikut gambaran pemetaan pemasalahan untuk penentuan Prioritas dan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana ***terlampir***

TABLE . B-35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika		
1 Minimnya Infrastruktur dan SDM di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	<p>1 Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Majalengka yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;</p> <p>2 Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika</p> <p>3 Belum terintegrasinya <i>database</i> dan layanan <i>e-Government</i> Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Kurang nya sarana Infrastruktur Komunikasi dan informatika yang mendukung terhadap peningkatan layanan sistem informasi</p> <p>1 Perlu adakannya sosialisasi dan BinteK tentang Pengembangan TIK dalam membetuk SDM layanan Komunikasi dan Informatika yang handal</p> <p>1 Perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan Layanan E Government di Daerah</p>
2 Masih rendahnya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK oleh Masyarakat	1 Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan layanan informasi kepada publik akan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga masih perlu ditingkatkan	1 Perlu diadakan sosialisasi dan BinteK terhadap Masyarakat dalam rangka pemahaman TIK di era globalisasi
3 Belum Meratanya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika di Pedesaan	<p>1 Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>2 Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;</p>	<p>1 Perlu Perencanaan , penganggaran Sarana Infrastruktur dan pengembangan SDM sampai Kepelosok Pedesaan</p> <p>1 Masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya memahami akan Pentingan TIK</p>
(2) Bidang Urusan Statistik		
1 Masih terdapat sumber /referensi data Pembangunan yang berbeda-beda pada masing-masing OPD dan BPS	1 ketepatan data Statistik setiap OPD belum konsisten terhadap validitas data yang benar-benar di pertanggungjawabkan.	1 Perlu di buatn Dokumen Data / Informasi Pembangunan yang Realible setiap tahunnya
2 Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data Statistik	1 Masyarakat belum memahaminya manfaatnya akan data Statistik	2 Perlu media layanan Informasi Publik / data Base Statistik sektoral melalui Akses Jaringan Informasi

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Isu-isu strategis yang berkembang sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, baik dalam pemenuhan SPM maupun MDGS, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penentuan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
2. Penggalan sumber dana untuk menunjang kelangsungan suatu program dan kegiatan.
3. Penataan manajemen dan administrasi harus benar- benar mencerminkan sikap terbuka terhadap aspirasi yang muncul dari masyarakat dan dapat merealisasikannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya aparatur ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat di bidang perekonomian.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang perencanaan program dan kegiatan.
7. Optimalisasi sarana dan prasana serta fasilitas pendukung untuk menunjang Program dan Kegiatan Strategis

4. Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan OPD

Sebuah organisasi pemerintahan yang ditata dengan manajemen mengacu kepada lingkungan kekinian dan masa depan secara terorganisir untuk pencapaian target. Secara aplikatif, manajemen organisasi saat ini telah berkembang sangat maju, sehingga perlu manajemen yang mengarah kepada kepentingan

umum (*Publik Service*) yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal (*Global System*).

a. Kekuatan (Strengths)

- Adanya legalitas Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Radika FM
- Tersedianya Sarana Penyebaran informasi Publik melalui media massa
- Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Terbentuknya SDM Komunikasi di OPD, Kecamatan serta Desa

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Profesionalisme Kinerja Pegawai yang kurang Optimal
- Aksebilitas sarana Komunikasi belum terjangkau keseluruhan
- Kurang nya animo masyarakat akan informasi melalui radio
- Belum terpenuhinya penyebaran informasi media massa diterima oleh masyarakat
- Masih belum optimal pengkoordinasi Pembentukan KIM
- Kualitas SDM Komunikasi belum optimal

c. Peluang (Opportunities)

- Kebijakan Pemerintah akan organisasi dinas Komunikasi dan Informatika menunjang
- Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
- Kualitas sarana dan fasilitas pendukung Teknologi Penyiaran akan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan jaman

- Tuntutan Pemerintah terhadap Masyarakat menunjang peningkatan akan komunikasi dan informasi media massa
- Kebutuhan Organisasi yang semakin meningkat
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. Ancaman (Threats)

- Keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah
- Kurangnya Koordinasi dalam menyusun Program
- Perkembangan globalisasi, Iptek, arus transformasi dan Komunikasi sangat pesat.
- Belum dilaksanakannya tata kelola layanan informasi yang efektif
- Semakin banyaknya organisasi masyarakat yang bermunculan
- Masih rendahnya komitmen pengelolaan sumber daya Komunikasi dan informasi

5. Isu Isu Trategis dalam Perumusan Program / Kegiatan

1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi. dengan kondisi tersebut, maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kota / Kabupaten .

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government

Kabupaten Majalengka mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak pada wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya. Saat ini warga Kabupaten Majalengka telah memasuki budaya perkotaan yang dicirikan dengan tingkat pendidikan yang baik, daya kritis yang tinggi, mobilitas yang tinggi, membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, efisiensi dan tidak menyukai sikap birokrasi yang lamban.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur Pemerintah Kabupaten Majalengka. Aparatur pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majalengka terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

8. Rencana Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;
9. Rencana Pembangunan Jalan TOL CISUMDAWU dan TOL CIKAPALI;
10. Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Cirebon.

Pertimbangan rencana baru yang akan berkaitan dengan struktur ruang adalah:

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka.
- b. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka
- c. Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten
- d. Pembangunan Jalan tembus Majalengka – Lemahsugih.
- e. Pengembangan Luas Ibu Kota Kabupaten Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran)
- f. Pengembangan pemanfaatan Waduk Jati Gede.
- g. Pengembangan Kawitwangi (Kawasan Wisata Sindangwangi).
- h. Pengembangan wisata situs Prabu Siliwangi.
- i. Pengaturan tentang kebencanaan.

2. Penentuan Terhadap Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

➤ **Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan /instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan

adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

➤ **Komitmen terhadap e-development**

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri

dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2.4. REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RKPD. RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2018-2023 (revisi) dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2021 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam ataupun mengukur Kinerja yang sudah tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Komunikasi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang Komunikasi informatika Statistik sektoral dan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Majalengka **Pada Tabel 3 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)** ini, diperlukan:

- a. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
- b. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika .

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;

2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. dan Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini : Majalengka **Pada Tabel 4 (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**



BAB 3

TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi

- Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
 5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
 6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
 7. Pengelolaan layanan Informasi Publik dengan terintegrasinya SP4-N Laport dengan Kementerian PAN –RB

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Keberhasilan Pembangunan Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari percepatan Indikator Makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui 9 (sembilan) sektor bidang usaha, yaitu bidang pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, Infrastruktur bangunan gedung, jalan, perhubungan dan komunikasi, perdagangan, serta Hotel dan restoran.

Bidang komunikasi merupakan satu sektor yang sangat mendukung terhadap laju pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat seiring dengan kemajuan pembangunan di Kabupaten Majalengka menuntut adanya pembenahan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Komunikasi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat terhadap aktivitas kebutuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, berangkat dari tuntutan tersebut maka pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dirumuskanlah **VISI** DISKOMINFO Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAJALENGKA RAHARJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ”

Sebagai penjabaran visi di atas, maka berikut ini ditetapkanlah **Misi** Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana perkantoran, serta Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran;
2. Mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Membangun infrastruktur komunikasi dan informatika serta layanan informasi publik yang handal, akuntabel, efektif, efisien;
4. Memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama kemitraan media massa dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
5. Mengoptimalkan penerapan E- Government di Kabupaten Majalengka.
6. Mengoptimalkan upaya pemenuhan data base statistik sektoral serta pengamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

A. Tujuan

Tujuan rencana kerja dinas yang merupakan implementasi visi misi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta akuntabilitas kinerja dan keuangan.
2. Mengembangkan dan membina kualitas SDM Aparatur dan masyarakat di bidang komunikasi, informasi dan statistik.
3. Mewujudkan infrastruktur komunikasi dan informatika didukung perangkat teknologi yang handal dan berkualitas
4. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak, elektronik, wawar keliling dan jurnalisme warga.

5. Mewujudkan kemitraan pemerintah dengan stake holder pembangunan.
6. Meningkatkan layanan online dan sistem elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
7. Mewujudkan sistem data base statistik sektoral dan Persandian

B. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana perkantoran serta Akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat yang profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Terwujudnya infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal didukung oleh fasilitas teknologi informasi untuk menghasilkan kualitas informasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. Terwujudnya kerjasama kemitraan media masa dalam penyebarluasan informasi;
5. Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan stake holder di bidang komunikasi dan informasi;
6. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
7. Terwujudnya sistem data base statistik sektoral berbasis teknologi

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka diperlukan strategi langkah pencapaian sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD dan RKPD

Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) tahun 2019-2023, telah menjadi dasar acuan dalam penyusunan setiap kebijakan dan strategi pembangunan, sekaligus mewarnai setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholder pembangunan.

Berdasarkan Komitmen tersebut diatas, serta dengan memperhatikan isu-isu strategi yang telah di indentifikasikan berdasarkan perkembangan perekonomian Nasional dan Regional Jawa Barat serta Pencapaian Indikator Makro Sosial Ekonomi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019-2023, maka perlu disusun langkah- langkah Strategi. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 tidak terlepas pada RKPD dengan menitik beratkan kepada upaya-upaya sebagai berikut :

1. Optimalisasi Upaya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di bidang Kapasitas Peningkatan SDM Statistik dan SDM Komunikasi dan Informatika
2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik di bidang Pengembangan Layanan Sistem Informasi dan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
3. Optimalisasi Peningkatan Administrasi Perkatoran dan memfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang tata kelola administrasi Perkantoran

4. Optimalisasi dalam upaya peningkatan Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik yang berkaitan dengan E. Government.

D. KEBIJAKAN

Dalam upaya menjalankan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dinas, maka diperlukan poin-poin kebijakan sebagai dasar pijakan pembentukan program dan kegiatan aplikatif. Secara umum kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika telah digariskan pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 sebagaimana dikemukakan di awal bab ini. Adapun poin berikut ini merupakan langkah-langkah kebijakan teknis aplikatif bidang komunikasi dan informatika mengacu kepada tujuan, sasaran, dan strategi dan Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pemerintahan Daerah dalam rangka pelayanan Publik
2. Pemenuhan Kebutuhan Teknologi Komunikasi dan Informasi yang di tunjang oleh sarana dan SDM di bidang Informatika
3. Penenuhan sarana dan Prasarana Infrastruktur Komunikasi dan Informatika berbasis Jaringan Komunikasi dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Sarana Media cetak dan elektronik dalam upaya penyebaran luasan informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan jurnalisme warga
5. Penyediaan Dokumen dan Data Informasi Pembangunan Daerah Sebagai bahan Penyusunan Kebijakan

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika tahun 2019 – 2023 mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 hal ini perlu menyelaraskan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, maka disusunlah rencana dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat menjadi 5 program urusan bidang dan 43 Kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2021 yaitu;

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
4. Program Informasi dan Komunikasi Publik
5. Program Aplikasi Informatika

Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka periode Renstra 2019-2023 dan untuk Renja Periode tahun 2021

1. Program Wajib Pemerintah tidak terkait pelayanan Dasar

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan sub Kegiatan :

1. Penyusunan Renstra dan Renja
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan Sub Kegiatan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
 12. Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah
 13. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 15. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
 16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 4. Kegiatan** Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya dengan Sub Kegiatan
1. Pengadaan Pakian Khusus hari-hari tertentu

B. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan.Analisis dan Desiminasi data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Pengembangan Infrastruktur

C. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan tata kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelola Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota
5. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

D. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Pelayanan Informasi Publik.
5. Layanan Hubungan Media.
6. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan.
7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

E. Program Aplikasi Informatika

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Informasi Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
2. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan.
6. Pengembangan dan Pengeolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas.
7. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Adapun rincian rencana kegiatan per program Dinas Komunikasi Informatika tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut **Table 5 (Table 5 T-C 33)**



BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 berdasarkan hasil input sistem RKPD online (<http://rkpd.majalengkakab.go.id/>), pada tahapan Finalisasi Rancangan Akhir RKPD, adalah sebagai berikut :



BAB 5

PENUTUP



Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra serta perubahan monent klatur penyusunan Renstra tahun 2019 – 2023 berdasarkan Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tetap mengacu terhadap tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui pemetaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD tahun Anggaran 2021

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama PD yang membidangi fungsi lain

Pada penyusunan RENJA Tahun 2021, ini telah dilakukan upaya yang bersifat *Planing bottom up Sistem*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka berupaya mengakomodir seluruh ajuan atau masukan rencana pembangunan yang tersampaikan melalui Forum Musrenbang Kecamatan dan Forum

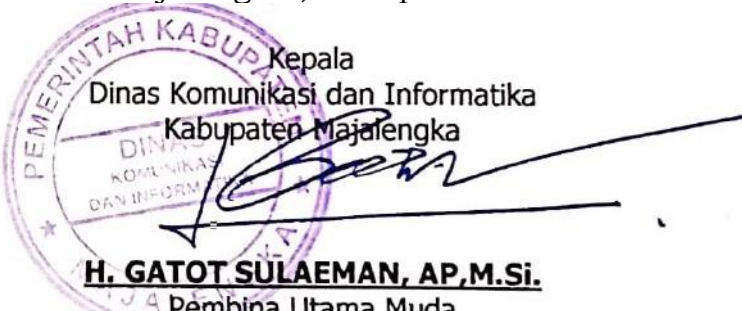
Perangkat Daerah Bidang Sarana Insfrastruktur, diiharapkan upaya tersebut dapat mendorong dan mewujudkan RENJA yang representatif dalam rangka menunjang tercapainya target tahunan yang tertuang dalam RENSTRA PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Perwujudan RENJA yang representatif hendaknya ditindaklanjuti dengan konsistensi pada proses eksekusi program dan kegiatan, Konsistensi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh prioritas program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai target, sasaran dan indikator kinerja, hal ini perubahan eksternal yang cukup berpengaruh terhadap proses realisasi program dan kegiatan hendaknya telah terantisipasi, sehingga pengaruh tersebut tidak terlalu mengganggu terhadap kelancaran realisasi program dan kegiatan. Dalam hal ini diperlukan *political will* dari para pemangku kepentingan dan Kebijakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan dan upaya penanganannya terhadap perencanaan yang akan dilaksanakan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Majalengka Tahun 2021, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi tolok ukur kinerja dinas di masa yang akan datang.

Majalengka , September 2020

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1760528 199412 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 6 Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Hal.01

Kode	Urusan/urusan bidang/urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Indikatif (Rp)	Keterangan			
					Capaian Kegiatan		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						671.553.360	772.286.364				
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka						671.553.360	772.286.364				
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan		Jumlah Perda Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen					0
										Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Insfrastruktur TIK	2 Dokumen					
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Jumlah Data Aplikasi Analis Media Massa dan Media Sosial	Jumlah Data Aplikasi Analis Media Massa dan Media Sosial	2 Dokumen			10.000.000	11.500.000	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Informasi Publik			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Jumlah Media Promosi (Seminar, Buku, Papan Reklame, dan Baligo)	4 Jenis			85.000.000	97.750.000	
										Publikasi Media Informasi ,Publikasi Media Online dan Perlengkapan alat Studio dan Komunikasi	4 Jenis					
										Jumlah Pengelolaan Media Centre, Website, Perlengkapan Peralatan Kantor dan Alat alat Studio	3 Jenis					
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Informasi Publik Worshop, Bimtek, SP4N Lapor	10 Kali			75.200.000	86.480.000	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Jumlah Media Cetak, Baligo, Cetak Spanduk, Dokumentasi, Iklan Radio Spots, Leaflet, Poster, Buku, Kumpulan Pidato, Bupati dan Majalah Gema Sindangkasih	8 Jenis			326.577.360	375.563.964	
										Jumlah Perangkat Radio LPPL	7 Unit					

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Jumlah Pemberdayaan LKS Melalui Kegiatan, Pameran, Work Shop, Pendampingan, Tabloid KIM, Film Dokumenter Jumlah Publikasi Pemerintah Daerah, Publikasi Pemerintahan Daerah, Saresehan, Work Shop, Dialog Interaktif	7 Kali 10 Kali				165.776.000	190.642.400		
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan			Jumlah Media Publikasi, Seminar, Jurnalistik, Publikasi TV, Publikasi Media Massa Jumlah Pelaksanaan Jumpa Pers Saresahan, Workshop	24 Kali 12 Bulan				9.000.000	10.350.000		
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													31.277.371.540	35.641.227.258		
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka													416.771.540	479.287.271	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tercapainya Pembangunan dan Pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah Tercapainya Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi Tercapainya Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital Tercapainya Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo Jumlah Sarana dan fasilitas Command Centre Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Perangkat Akses Wifi Desa	1 Perangkat 1 Perangkat 1 Perangkat 1 Kegiatan 60 Desa				416.771.540	479.287.271		
2	16	03	2.02	Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka													30.860.600.000,00	35.161.939.987,00	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah	1 Perangkat				315.600.000,00	362.940.000,00		
2	16	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tercapainya Pengembangan Server Pusat Informasi	1 Perangkat				125.000.000,00	143.750.000,00		
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tercapainya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Perangkat				160.000.000,00	184.000.000,00		

(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tersusunnya Integrasi Sistem Elektronik Berbasis Pemerintah Daerah	1 Perangkat		175.000.000,00	201.250.000,00		
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Majalengka Cerdas dab Kota Cerdas			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tercapainya Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City	1 Perangkat		30.000.000.000,00	34.500.000.000,00		
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah		Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	50 Orang		85.000.000,00	97.750.000,00		
2	16	01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											1.237.000.000,00	1.365.625.000,00		
2	16	01	2.01	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	100%					42.500.000,00	48.875.000,00	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen		10.000.000,00	11.500.000,00		
2	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (RKA,RKPA, DPA/ DPPA)	4 Dokumen		17.000.000,00	19.550.000,00		
2	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen		8.000.000,00	9.200.000,00		
2	16	01	2.01	04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Dokumen Lakip	1 Dokumen		7.500.000,00	8.625.000,00		
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan					Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%				7.500.000,00	1.316.750.000,00		
2	16	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen		7.500.000,00	8.625.000,00		
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Laporan Grognosis Realisasi Anggaran			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum			Jumlah Laporan Program yang tersedia	4 Jenis Laporan				0,00	
2	16	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum			Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan				0,00	

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2	16	01	2.03	Administrasi Umum													1.117.500.000,00	1.285.125.000,00
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Biaya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpn, dan Bandwith	5 Jenis			359.400.000,00	413.310.000,00		
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Prosentase sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Kendaraan Dinas Yang di peliharaan	3 Unit			9.060.000,00	10.419.000,00		
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Prosentase Pegawai yang terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kelancaraan Administrasi Perkantoran	2 Jenis			138.750.000,00	159.562.500,00		
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	40 Jenis			50.000.000,00	57.500.000,00		
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Cetakan, Photo Copy dan Penjilidan	3 Jenis			38.700.000,00	44.505.000,00		
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30 Jenis			25.000.000,00	28.750.000,00		
2	16	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	20 Unit			45.000.000,00	51.750.000,00		
2	16	01	2.03	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Surat Kabar dan Jasa Publikasi di Media Cetak	12 Bulan			90.000.000,00	103.500.000,00		
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan peserta dan Tamu	4 Jenis			102.000.000,00	117.300.000,00		
2	16	01	2.03	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan			100.000.000,00	115.000.000,00		
2	16	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit				0,00		
2	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	6 Jenis			34.800.000,00	40.020.000,00		
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Jenis			66.500.000,00	76.475.000,00		
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah		Jumlah Bangunan gedung yang di pelihara	3 Unit			58.290.000,00	67.033.500,00		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2	16	01	2.03	Administrasi Umum										35.000.000,00	40.250.000,00
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah		Jumlah Perlengkapan Gedung yang di pelihara	5 Jenis		20.000.000,00	23.000.000,00
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah		Jumlah Peralatan Gedung yang di pelihara	5 Jenis		15.000.000,00	17.250.000,00
2	16	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang /Berat/ Rumah Gedung Kantor			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum			Jumlah Rebah Bangunan Tempat Kerja	3 Jenis			
2	16	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										34.500.000,00	39.675.000,00
2	16	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu			Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja		Jumlah Pakaian Dinas ,Batik dan Pakian Olah Raga	50 Stel		34.500.000,00	39.675.000,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										800.000.000,00	920.000.000,00		
2	20	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										800.000.000,00	920.000.000,00	
2	20	01	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota										800.000.000,00	920.000.000,00
2	20	01	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Disiminasi Data Statistik Sektoral			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah sarana Pelayanan data Statistik		Jumlah Data Set 30 OPD' Jumlah Hasil Pengumpulan Data, Jumlah Dokumen / Buku	1 Dokumen, 2 Dokumen, 4 Dokumen		232.000.000,00	266.800.000,00
2	20	01	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Tingkat Pemenuhan SDM yang berkopesntesi di bidang Statistik Sektoral		Jumlah Pelaksanaan Workshop dan Bimtek	2 Jenis Kegiatan		106.000.000,00	121.900.000,00
2	20	01	2.01	03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Terpenuhinya Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Meta Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		171.000.000,00	196.650.000,00
2	20	01	2.01	02	Pengembangan Infrastruktur			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang menunjang Pengumpulan Data Statistik		Jumlah Pengadaan Insprastruktur Statistik Sektoral, Jumlah Unjungan Data Mandiri	Unit dan 4 Unit		291.000.000,00	334.650.000,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										752.075.100,00	864.886.365,00		
2	21	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										525.000.000,00	603.750.000,00	
2	21	01	2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah / Kota										525.000.000,00	603.750.000,00
2	21	01	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah /Kota			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Tingkat Keamanan Informasi Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Keamanan Informasi Peranglat Daerah , Jumlah Akses Informasi secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Kabupaten /	1 Dokumen 12 Bulan		200.000.000,00	230.000.000,00
2	21	01	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi		Jumlah Dokumen Kemanan Informasi	1 Dokumen		50.000.000,00	57.500.000,00
2	21	01	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Iformasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi		Jumlah Data dan Informasi yang terakses pada Jaringan Aplikasi Santel	12 Bulan		75.000.000,00	86.250.000,00
2	21	01	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi		Jumlah Data Informasi yang Terakses secara aman pada jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan		200.000.000,00	230.000.000,00

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
2	21	01	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota													227.075.100	261.136.365	
2	21	01	2.02	01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi		Meningkatkan Jumlah dokumen dan Informasi Persandian	12 Bulan			227.075.100	261.136.365				
															34.738.000.000	39.564.024.987				

Tabel 2 (Tabel T-C 30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Aspek Pelayanan Umum										
2.25.	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar										
2.25.1	Bidang Komunikasi dan Informatika										
(1)	Rasio Warnet / Warnet Terhadap Penduduk			1:5030	1:5030	1:5030	1:5030	1:5030	100	100	
(2)	Jumlah Penyiaran Radio / TV Radio			36	36	36	36	36	100	100	
(3)	Web Site Milik Pemerintahan Daerah			45	57	57	45	45	100	100	
(4)	Sistem Informasi Manajemen Pemda			49	49	49	49	49	100	100	
(5)	Jumlah Jaringan Telekomunikasi (Jumlah Tower Telekomunikasi			234	238	238	234	238	100	100	
2.23	Bidang Penyelenggaraan Statistik										
(1)	Buku Kabupaten Dalam Angka										
(2)	Buku " PDRB Kabupaten Majalengka			ada	ada	ada	ada	ada			
(3)	Buku Statistik Sektoral			ada	ada	ada	ada	ada			
(4)	Rasio Gini			ada	ada	ada	ada	ada			
(5)	Data Pembangunan			ada	ada	ada	ada	ada			
(6)	Profil Sosial Ekonomi Daerah			ada	ada	ada	ada	ada			
(7)	Pemerataan Pembangunan			ada	ada	ada	ada	ada			
(8)	Indikator Pembangunan			ada	ada	ada	ada	ada			
(9)	Statistik Regional			ada	ada	ada	ada	ada			

Tabel. 4 (Tabel TC- 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemegang Kepentingan Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Majalengka

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi dan Komunikasi				
8	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi	Desa / Kelurahan di Kabupaten Majalengka	Jumlah 10 Unit Perangkat Wifi Desa	50.000.000	10 Desa di Kabupaten Majalengka

TABEL . 4 (TABEL T-C 33)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**

Hal 01

Kode	Usuran/urusan bidang/urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka									
			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis bidang Komunikasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perda Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Insfrastruktur TIK	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Dokumen 2 Dokumen		APBD		2 Dokumen 2 Dokumen	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Data Aplikasi Analis Media Massa dan Media Sosial	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Dokumen	10.000.000	APBD	Jumlah Data Aplikasi Analis Media Massa dan Media Sosial	2 Dokumen	11.500.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	4 Jenis	85.000.000	APBD	Jumlah Media Promosi (Seminar, Buku,Papan Reklame,dan Baligo)	4 Jenis	97.750.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	10 Kali	75.200.000	APBD	Jumlah Sarana Informasi Publik, Work Shop,Bintek , SP4N Lapor	10 Kali	82.720.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	8 jenis	326.577.300	APBD	Jumlah Media Cetak,Baligo,Cetak Spanduk,Dokumentasi, Iklan Radio Spots,Leafet,Poster, Buku,Kumpulan Pidato, Bupati dan Majalah Gema Sindangkasih	8 Jenis	375.563.895

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	7 Kali	165.776.000	APBD	Jumlah Pemberdayaan LKS Melalui Kegiatan, Pameran, Work Shop, Pendampingan, Tabloid KIM, Film Dokumenter	7 Kali	190.642.400
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	24 Kali	9.000.000	APBD	Jumlah Media Publikasi, Seminar, Jurnalistik, Publikasi TV, Publikasi Media Massa	24 Kali	10.350.000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka								
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Perangkat	416.771.540	APBD	Tercapainya Pembangunan Pengembangan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi	1 Perangkat	479.287.271
2	16	03	2.02		Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka								
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Perangkat	315.600.000	APBD	Tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah	1 Perangkat	362.940.000
2	16	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Perangkat	125.000.000	APBD	Tercapainya Pengembangan Server Pusat Informasi	1 Perangkat	143.750.000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Perangkat	160.000.000	APBD	Tercapainya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Perangkat	184.000.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Perangkat	175.000.000	APBD	Tersusunnya Integrasi Sistem Elektronik Berbasis Pemerintah Daerah	1 Perangkat	201.250.000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Majalengka Cerdas dab Kota Cerdas	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Perangkat	30.000.000.000	Bankeu	Tercapainya Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Akses Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City	1 Perangkat	34.500.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	50 Orang	85.000.000		Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	50 Orang	97.750.000
2	16	01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
2	16	01	2.01	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Dokumen	10.000.000	100%	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.500.000
2	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	4 Dokumen	17.000.000		Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (RKA,RKPA, DPA/ DPPA)	4 Dokumen	19.550.000
2	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	1 Dokumen	8.000.000		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.200.000
2	16	01	2.01	04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	1 Dokumen	7.500.000		Jumlah Dokumen Lakip	1 Dokumen	8.625.000
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan									
2	16	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	1 Dokumen	7.500.000		Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.625.000
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Laporan Grognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Laporan Program yang tersedia	4 Jenis Laporan	
2	16	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	16	01	2.03	Administrasi Umum									
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	5 Jenis	359.400.000		Jumlah Biaya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon, dan Bandwith	5 Jenis	413.310.000
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Unit	9.060.000		Jumlah Kendaraan Dinas Yang di peliharaan	3 Unit	10.419.000
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Jenis	138.750.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kelancaraan Administrasi Perkantoran	2 Jenis	159.562.500
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	40 Jenis	50.000.000		Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	40 Jenis	57.500.000
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Jenis	38.700.000		Jumlah Cetakan, Photo Copy dan Penjilidan	3 Jenis	44.505.000
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	30 Jenis	25.000.000		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	30 Jenis	28.750.000
2	16	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	20 Unit	45.000.000		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	20 Unit	51.750.000
2	16	01	2.03	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	12 Bulan	90.000.000		Jumlah Surat Kabar dan Jasa Publikasi di Media Cetak	12 Bulan	103.500.000
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	4 Jenis	102.000.000		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Pertemuan peserta dan Tamu	4 Jenis	117.300.000
2	16	01	2.03	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	12 Bulan	100.000.000		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultansi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	115.000.000
2	16	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Unit			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	
2	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	6 Jenis	34.800.000		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultansi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	6 Jenis	40.020.000
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	4 Jenis	66.500.000		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultansi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Jenis	76.475.000
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Unit	58.290.000		Jumlah Bangunan gedung yang di pelihara	3 Unit	67.033.500

(1)				(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	16	01	2.03	Administrasi Umum									
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	5 Jenis	20.000.000		Jumlah Perlengkapan Gedung yang di pelihara	5 Jenis	23.000.000
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	5 Jenis	15.000.000		Jumlah Peralatan Gedung yang di pelihara	5 Jenis	17.250.000
2	16	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang /Berat/ Rumah Gedung Kantor		Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum				Jumlah Rebah Bangunan Tempat Kerja	3 Jenis	
2	16	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
2	16	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	Tingkat Pemenuhan sarana dan Prasarana Kerja	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	50 Stel	34.500.000		Jumlah Pakaian Dinas ,Batik dan Pakian Olah Raga	50 Stel	39.675.000
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
2	20	01	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota									
2	20	01	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Disiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah sarana Pelayanan data Statistik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen, 2 Dokumen, 4 Dokumen	232.000.000		Jumlah Data Set 30 OPD' Jumlah Hasil Pengumpulan Data, Jumlah Dokumen / Buku	1 Dokumen, 2 Dokumen, 4 Dokumen	266.800.000
2	20	01	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Tingkat Pemenuhan SDM yang berkoptensi di bidang Statistik Sektoral	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Jenis Kegiatan	106.000.000		Jumlah Pelaksanaan Workshop dan Bimtek	2 Jenis Kegiatan	121.900.000
2	20	01	2.01	03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Terpenuhinya Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen	171.000.000		Jumlah Dokumen Meta Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	196.650.000
2	20	01	2.01	02	Pengembangan Infrastruktur	Tepenuhinya Sarana dan Prasarana yang menunjang Pengumpulan Data Statistik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	8 Unit dan 4 Unit	291.000.000		Jumlah Pengadaan Insprastruktur Statistik Sektoral, Jumlah Unjungan Data	8 Unit dan 4 Unit	334.650.000
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
2	21	01	2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah / Kota									
2	21	01	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah /Kota	Tingkat Keamanan Informasi Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen 12 Bulan	200.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Keamanan Informasi Peranglat Daerah , Jumlah Akses Informasi secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah	1 Dokumen 12 Bulan	230.000.000
2	21	01	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Kemanan Informasi	1 Dokumen	57.500.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	21	01	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	12 Bulan	75.000.000		Jumlah Data dan Informasi yang terakses pada Jaringan Aplikasi Santel	12 Bulan	86.250.000	
2	21	01	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	12 Bulan	200.000.000		Jumlah Data Informasi yang Terakses secara aman pada jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	230.000.000	
2	21	01	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten /Kota									
2	21	01	2.02	01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik Yang terkoneksi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	12 Bulan	227.075.100		Meningkatkan Jumlah dokumen dan Informasi Persandian	12 Bulan	261.136.365	
									34.738.000.000				39.564.024.987	

RKPD TAHUN 2021										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		DAU	BANKEU	DAK	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKAT OR KINERJA			TOTAL PAGU 2021			
												CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		
												TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR			TARGET	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	350.000.000			X	XX	0.1	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Biaya Jasa Komunikasi, Air, Listrik, Telepon, Banwith	(5 Jenis)	Meningkatnya Penyelenggaraan Penata Usahaan Administrasi Perkantoran	359.400.000	
						X	XX	0.1	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						X	XX	0.1	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns							
						X	XX	0.1	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000			X	XX	0.1	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Kendaraan yang di pelihara	(3 Jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	9.060.000	
					X	XX	0.1	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								
IV	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	150.000.000			X	XX	0.1	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan		Jumlah Sarana Pendukung Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 bulan	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	138.750.000	
						X	XX	0.1	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja							
		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan alat tulis kantor dan benda Pos	50.000.000			X	XX	0.1	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	(4 Jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	50.000.000	
		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000			X	XX	0.1	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Photo Copy, Cetak dan Penjilidan	(3 jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	38.700.000	
		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000			X	XX	0.1	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	(30 jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	25.000.000	
		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000			X	XX	0.1	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	50.000.000			X	XX	0.1	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	(20 jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	45.000.000	
		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	70.000.000			X	XX	0.1	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Surat Kabar dan Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	(12 bulan)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	90.000.000	
					X	XX	0.1	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan makanan dan minuman	103.940.000			X	XX	0.1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jenis Makanan dan Minuman Rapat, Tamu, Peserta, dan Panitia	(4 jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	102.000.000
--	--------------------------------	-------------	--	--	---	----	-----	------	----	--------------------------------	--	--	---	-----------	--	-------------

RKPd TAHUN 2021										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DAU	BANKEU	DAK	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TOTAL PAGU 2021	
				CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN							
				TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET								
Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika	100.000.000			X	XX	0.1	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	(12 bulan)	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	100.000.000
V				X	XX	0.1	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-			X	XX	0.1	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-														
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	50.000.000			X	XX	0.1	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						
				X	XX	0.1	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(10 Jenis)	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	34.800.000
				X	XX	0.1	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						
				X	XX	0.1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja		Jumlah Peralatan Gedung Kantor		Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	66.500.000
				X	XX	0.1	2.03	25	Pengadaan Mebeleur						
				X	XX	0.1	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				X	XX	0.1	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	35.000.000			X	XX	0.1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah		Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	(2 unit)	Meningkatkan Kinerja Sarana Fasilitas Layanan Publik	58.290.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	-														
				X	XX	0.1	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						
				X	XX	0.1	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						
				X	XX	0.1	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	40.000.000			X	XX	0.1	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2 jenis)	Meningkatkan Kinerja Sarana Fasilitas Layanan Publik	20.000.000
				X	XX	0.1	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						
				X	XX	0.1	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2 jenis)	Meningkatkan Kinerja Sarana Fasilitas Layanan Publik	15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				X	XX	0.1	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur						
				X	XX	0.1	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan						
				X	XX	0.1	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas						

RKPD TAHUN 2021										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		DAU	BANKEU	DAK	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA					TOTAL PAGU 2021
											CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN	
											TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor				X	XX	0.1	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor						
					X	XX	0.1	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan						
					X	XX	0.1	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional						
					X	XX	0.1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya						
					X	XX	0.1	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi						
					X	XX	0.1	2.04	02	Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya						
					X	XX	0.1	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						
					X	XX	0.1	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri						
Program Pendukung Administrasi Perkantoran	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	55.000.000			X	XX	0.1	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja		Jumlah Pakaian Dinas,Batik, dan Kaos Olah Raga	(50 stel)	Meningkatkan Kinerja Sarana Fasilitas Layanan Publik	34.500.000
					X	XX	0.1	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						
					X	XX	0.	2.0	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas						
					X	XX	0.1	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS						
					X	XX	0.1	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal						
					X	XX	0.1	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						
					X	XX	0.1	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						
URUSAN PEMERINTAHAN																
B	Urusan Bidang Statistik Sektoral				2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
I	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah					
					2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Updating Portal data Statistik Sektoral	126.060.000			2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik		Jumlah Data set 8 Urusan, Kesehatan, Agrikultur, Infrastruktur, adm,Keuangan, Pendidikan, ekonomi, Kependudukan, Pariwisata, sosial, Buku Open Hose	(1 Dok)	-Meningkatnya Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik ,	232.000.000
	Pengolahan Data spasial dan a Spasial	200.000.000											Jumlah Hasil Pengumpulan Data Dasar 3 Indikator	(1 Dok)	-Meningkatnya Jumlah Dokumen dan Informasi Statistik Sektoral,	
	Kajian Data Statistik Sektoral	-														
	ADM (Anjungan Data Mandiri	250.000.000											Jumlah Data Anjungan Data Mandiri	(1 Dok)	-Meningkatnya Sarana Infrastruktur Layan Informasi Publik	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	-			2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			Jumlah Pelaksanaan Workshop dan Bimtek	2 Jenis	Meningkatnya kapasitas SDM Pemda	106.000.000

RKPD TAHUN 2021				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DAU	BANKEU	DAK	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						TOTAL PAGU 2021
									CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		
									TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pembangunan Meta Data Statistik Sektoral	200.000.000		2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Jumlah Dokumen Meta Data Statistik Sektoral	(1 Dok)	Meningkatnya Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik	171.000.000
				2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pembangunan Infrastruktur Sektoral	200.000.000		2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur			Jumlah Pengadaan Infrastruktur Open Data	1 (unit)	Meningkatnya Jumlah Dokumen dan Informasi Statistik Sektoral	291.000.000
				2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah						
				2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
II	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi			2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
				2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Tersedianya Pusat Pengendalian Keamanan informasi Pemerintah Daerah	
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi				2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	(1 Dok)		200.000.000
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Penyusunan Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	75.000.000		2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi		Jumlah Dokumen keamanan informasi	(1 Dok)		50.000.000
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Audit Kemanan Informasi dan IT Security Assessment	100.000.000		2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi		Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	(12 Bulan)		75.000.000
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Pengelolaan Security Operation Center (SOC)	200.000.000		2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi		Jumlah data informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah daerah	(12bulan)		200.000.000
				2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					Meningkatnya Jumlah Aplikasi Software, Hardware Yang Terhubung Dengan Jaring Komunikasi Sandi	
Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	-		2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi		Jumlah data informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah daerah	(12bulan)		227.075.100
C	Urusan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral			2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN						
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi			2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						

RKPd TAHUN 2021					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DAU	BANKEU	DAK	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						TOTAL PAGU 2021
									CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		
									TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
				2	16	02	2.01	01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi				2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi				2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						
				2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah						
				2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Data Aplikasi Analisis Media Masa dan Media Sosial			2 Dokumen		10.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Promosi City branding		50.000.000	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Promosi ,Seminar Cty Banding, Buku, Papan Reklame City Branding	(4Jenis)	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Yang disediakan Pemerintah Daerah	85.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi Melalui Diskominfo Chanel		-												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan dan Pengelolaan Media Centre		-												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelayanan Informasi Publik		60.000.000	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana Informasi Publik, Workshop Bimtek SP4 N Laport	(10 Kali)	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Yang disediakan Pemerintah Daerah	75.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Desiminasi Informasi melalui media cetak elektronik, pertunjukan rakyat dan warling		490.000.000	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		Jenis Media Cetak, Dokumenter, Radio Sport, Majalah, Cetak Leafet dan Baligo	(8 jenis Kegiatan)	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Yang disediakan Pemerintah Daerah	326.577.360
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan		-												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Kualitas Operasional Pelayanan LPPL Radika		90.000.000							Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Radio LPPL	(7unit)	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Yang disediakan Pemerintah Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial		60.000.000	2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan						165.776.000

RKPD TAHUN 2021				PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DAU	BANKEU	DAK	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						TOTAL PAGU 2021	
										CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
										TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-																
							2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis					
							2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					
							2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	150.000.000						2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					9.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	75.000.000																
II Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi							2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
							2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
							2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi					
							2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi					
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	150.000.000						2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	Jumlah Akses Jaringan Informasi dan Komunikasi Desa / Kel	-15	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang disediakan Pemerintah Daerah	416.771.540
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	125.000.000												Jumlah Layanan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kominfo	(5 Jenis)			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		5.000.000.000											Jumlah Sarana Fasilitas Command Centre	(1 set)			
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	-																
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	100.000.000												Tersedianya Sarana Infrastruktur Jaringan Interkoneksi Komunikasi dan Informatika	(3 perangkat)			
							2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatnya Sarana Infrastruktur Layanan Informasi Publik	

RKPD TAHUN 2021					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	DAU	BANKEU	DAK	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA						TOTAL PAGU 2021
										CAPAIAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		
										TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pembangunan , Pengembangan dan Pengendalian E-Government (Sistem Elektronik Pemerintah)	250.000.000			2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Jaringan Informasi Pemerintah Daerah	(2unit)		315.600.000
					2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Server Pusat Informasi	150.000.000			2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Perangkat Kapasitas Server OPD	(5jenis)		125.000.000
					2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						
					2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi						
					2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pembangunan dan pengembangan e-Office Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	150.000.000			2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi		Jumlah jaringan Man (Metropolitan Area Network) OPD	(2 Perangkat)	Meningkatkan sarana infrastruktur layanan Informasi Publik	160.000.000
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	Pembangunan Infrastruktur UMKM Go Online	-														
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	Pengembangan Sistem Informasi Kegawatdaruratan berbasis Android	100.000.000											Jumlah Infrastruktur Aplikasi jaringan Kegawat daruratan	(1 Aplikasi)		
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	Pengembangan Aplikasi SILADU menjadi Work Online	100.000.000											Jumlah sarana Infrastruktur Jaringan SILLADU	(1Unit)		
					2	16	03	2.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				1 Paket		175.000.000

